

BAB II

THAILAND DALAM PETA WISATA INTERNASIONAL

Pada bab ini penulis akan membahas tentang perkembangan industri pariwisata di negara Thailand yang kemudian menjadi destinasi utama wisatawan asing sehingga sektor pariwisata Thailand menjadi pilar utama perekonomian negara tersebut. Namun dibalik pesat dan suksesnya industri pariwisata Thailand dan menjadikan Thailand berada diperingkat puncak sebagai negara dengan kunjungan wisatawan asing seluruh dunia, terdapat sisi gelap dari industri pariwisata di Thailand. Beberapa faktor menjadikan industri pariwisata Thailand sebagai sarana perdagangan manusia dan pariwisata seks. Fenomena ini terus mendapat perhatian luas dari beberapa kalangan tak hanya dari kalangan lokal di Thailand namun juga dari beberapa aktor internasional yang turut menyoroti tindakan yang sudah termasuk dalam pelanggaran yang serius.

A. Perkembangan Industri Pariwisata Thailand Menjadi Tujuan Destinasi Internasional

Pariwisata internasional saat ini menjadi daya tarik yang vital untuk sebuah kota menjadi tujuan utama dunia dan menjadi faktor ekonomi sosialnya. Perkembangan Thailand sejak dulu memang memiliki sifat negara yang terbuka dengan dunia luar. Abad ke 19, Thailand menjadi *Buffer State* karena mampu memanfaatkan persaingan dan ketegangan antara Indocina, Prancis dan Kerajaan Inggris (<https://vdocuments.site/>, 2015). Hal ini membuat Thailand mudah dikenal secara internasional. Walaupun bersifat terbuka dengan dunia luar, Thailand tetap memegang erat budaya

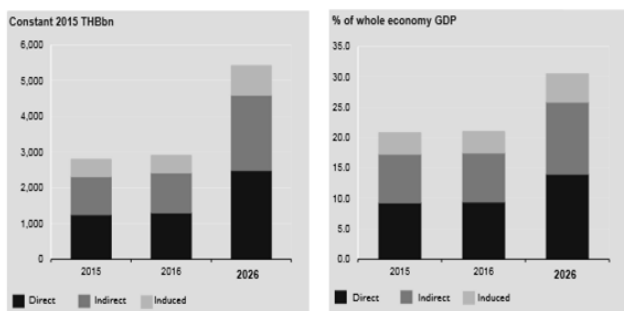
mereka. Salah satu sektor yang menarik masyarakat global terhadap Thailand adalah dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata Thailand terus menarik wisatawan dari seluruh dunia dan telah berkembang menjadi *model* yang sukses serta banyak ditiru oleh berbagai negara terutama negara di kawasan Asia. Bagi Thailand, industri pariwisata adalah salah satu diantara cabang-cabang ekonomi utama.

Data yang dihimpun oleh *Pasific Asia Travel Association* (PATA) pada tahun 2015 tercatat lebih dari 115 juta kedatangan internasional pada tahun 2015 yang diperkirakan akan mencapai angka 173 juta pada tahun 2018 dengan total pertumbuhan 2% setiap tahunnya. Thailand masuk dalam peringkat kedua dalam kategori *Top Five Fastest Growth Destinations* 2014-2018 dengan jumlah kedatangan internasional tertinggi yaitu 36 juta, disusul Malaysia 27,7 juta, Singapura 16,7 juta dan kemudian Indonesia, Kamboja, Filipina, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam yang masih berada pada angka dibawah 10 juta kedatangan pada tahun 2015 (PSSAT, Interkoneksi Pariwisata di Asia Tenggara, 2016). Survei yang dirilis oleh *Mastercard Global Destination Index* menyatakan bahwa 167 destinasi dari 22 negara di seluruh Asia Pasifik dan mewakili 90,1 persen dari semua pendatang internasional dalam semalam di wilayah Thailand (Mastercard, 2016).

Bahkan untuk pertama kalinya pada tahun 2013 lalu, Bangkok menempati peringkat pertama dimana berhasil mengungguli London dengan selisih sangat tipis yang kemudian diikuti Paris, Singapura, New York, Istanbul, Dubai dan lain-lain. Ini adalah pertama kalinya kota di Asia berada di peringkat teratas sejak indeks diluncurkan pada tahun 2010 (Wong, Mastercard Global Destination Cities Index 2013 Report, 2013). Bangkok menunjukkan penguatan pertumbuhan dengan peningkatan jumlah kedatangan wisatawan asing sebesar 9,5 persen dan 10,95 persen dengan total 15,98.

Menurut survei yang dilakukan *United Nations Economic And Social Commission for Asia and The Pasific* (ESCAP) pada tahun 2009, industri pariwisata berkontribusi 14,7% terhadap produksi domestik bruto Thailand. Menurut data pemerintah pada tahun 2010, Thailand menarik 15,8 juta turis asing dan menghasilkan 19 miliar dolar pendapatan. Kemudian pada tahun 2016, sektor perjalanan dan pariwisata Thailand menyumbang 2,9 triliun baht untuk produksi domestik bruto (PDB) yang merupakan 20,6 persen dari total PDB. Selain itu, sektor ini mendukung lebih dari 15 persen dari total lapangan kerja yaitu 5,7 juta pekerjaan (<http://www.nationmultimedia.com/>, Thailand in world top 10 for long term tourism growth: WTTC, 2017).

THAILAND: TOTAL CONTRIBUTION OF TRAVEL & TOURISM TO GDP



* All values are in constant 2015 prices & exchange rates

Tabel 1. Kontribusi Total Travel & Tour Terhadap PDB di Thailand

Sumber : WTTC - *Travel and Tourism Economic Impact 2016Thailand* dalam <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/thailand2016.pdf> diakses pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 18.17 WIB

Pertumbuhan sebuah kota sebagai tujuan pariwisata sangat bergantung pada daya tarik dari negara-negara

disekitarnya pula. Seperti pariwisata Thailand memiliki kota ‘pengumpulan’ seperti Singapura, Hong Kong, Tokyo dan Kuala Lumpur. Wisatawan asing yang datang ke Bangkok sebanyak 32% berasal dari wisatawan internasional khususnya kawasan Asia-Pasifik. Wisatawan yang berasal dari Tiongkok merupakan wisatawan terbesar yaitu terhitung 37%, kemudian Jepang dengan 8%, Amerika Serikat 4%, India dan Jerman sebesar 3% (Wong & Choong, Global Destination Cities Index by Mastercard, 2016, hal. 15).

Sebuah laporan merilis jumlah kedatangan wisatawan ke Thailand pada tahun 2013 mencapai 26,55 juta orang pendatang. Kemudian pada tahun 2014 kedatangan wisatawan menurun menjadi 24,81 juta orang. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 2013 ke 2014 sebesar -6,54 persen. Kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung secara signifikan yaitu sebesar 5 juta pengunjung, sehingga total mencapai 29.923.185 pengunjung wisatawan asing ke Thailand (<http://www.thaiwebsites.com/>, 2017). Data publik yang dirilis oleh CNN *Travel* Bangkok, Thailand menempati urutan pertama dengan kenaikan pendatang wisatawan asing pada tahun 2016 dengan total 19,41 juta orang kemudian pada tahun 2017 diperkirakan 20,19 juta orang pengunjung wisatawan asing yang datang ke Bangkok (<http://edition.cnn.com/>, 2017).



Grafik 2. Statistik Kedatangan Wisatawan dari Tahun 2000 sampai 2016

Sumber : <http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp> diakses pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 11.13 WIB

Hal ini jelas menggambarkan bahwa pariwisata menjadi industri terkemuka ekonomi Thailand. Dengan industri pariwisata, Thailand berhasil mempromosikan pengembangan industri lain yang terkait seperti hasil produksi. Tak hanya menyediakan agen *tour and travel* untuk datang ke Thailand dan menikmati kota, wisatawan asing yang datang juga menghabiskan uang mereka untuk membeli produk di Thailand. Menurut *Thai Hotels Association* (THA) pada tahun 2011, rata-rata tingkat hunian hotel berada dikisaran 59,21 persen dan terdapat lebih dari 4000 hotel di Thailand. Hotel-hotel dan pusat perbelanjaan membawa manfaat besar bagi ekonomi Thailand. Pada tahun 2011 hingga 2013, Bangkok menunjukkan peningkatan pertumbuhan tertinggi secara keseluruhan wisatawan dari 20 persen pada tahun 2011 menjadi 36 persen di tahun 2012 (Wong, Mastercard Global Destination Cities Index 2013 Report, 2013, hal. 7).

B. Thailand Sebagai Negara Yang Rentan Terhadap Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia atau perdagangan untuk perorangan (*Trafficking in Person / TIP*) adalah kejahatan yang keji dan terjadi yang meluas di seluruh dunia. Tindakan tersebut termasuk dalam bentuk perbudakan modern dan sebagian besar kejahatan perdagangan manusia adalah transnasional yang dioperasikan dan dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir (Roujanavong, 2015, hal. 134). Terdapat berbagai variasi datatentang perdagangan manusia seperti yang dilansir oleh *International Labour Organization* (ILO) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dari Perserikatan Bangsa - Bangsa. Data yang dirilis mengacu pada korban perdagangan manusia yang kerja pakasanya dilakukan oleh oknum pelaku swasta untuk di eksploitasi seksual. Pria dan wanita yang diperdagangkan yang dipaksa masuk kedalam industri seks komersial, kini juga melibatkan anak-anak. Data pada tahun 2012 hingga 2015 menunjukkan terdapat 1.082 kasus perdagangan manusia dalam bentuk kerja buruh dan 832 kasus perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual di Thailand dan sisanya dijadikan pengemis (UNODC, 2016). Perempuan dan anak perempuan menyumbang lebih banyak dari 99% korban eksploitasi seksual dan hampir 70% korban eksploitasi seksual berada di Asia (ALLIANCE, 2017, hal. 39).

■ FIG. 11 Forms of exploitation among detected female trafficking victims, 2014 (or most recent)

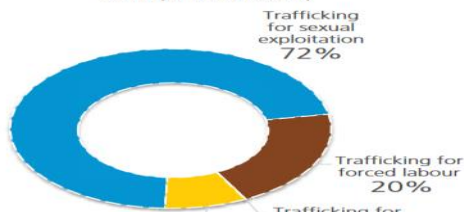


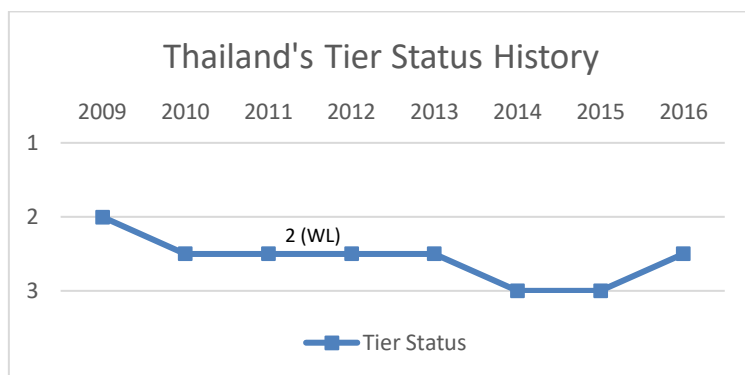
Diagram 3. Data Perdagangan Manusia oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Sumber : *UNODC-Global Report On Trafficking In Persons 2016* dalam https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 13.04 WIB

Perkembangan pariwisata Thailand menjadikan negara ini rentan akan praktik perdagangan manusia. Hal tersebut karena sektor pariwisata Thailand adalah sebagai *source country*. Thailand sejak dulu telah melakukan migrasi eksternal dimana mereka menjadi migrasi pekerja ke negara-negara yang kekurangan tenaga pekerja khususnya di negara-negara penghasil minyak. Sejak saat itu sekitar tahun 1980an Thailand terus mempromosikan ekspor tenaga kerja ke negara industri baru di Asia seperti Korea, Taiwan, Singapura dan Jepang. Selain aktivitas migrasi, Thailand sebagai negara transit juga memberikan peluang. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*(UNODC) Thailand merupakan tujuan negara transit dan tujuan bagi migran yang diselundupkan di Asia untuk menuju Tiongkok (Courtland Robinson, 2016, hal. 21-23).

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis data bahwa Thailand terus berada dalam daftar *Tier 2 Watch List 2017* yaitu daftar laporan perdagangan manusia yang dirilis oleh Amerika Serikat. Penyebabnya adalah pemerintah Thailand belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia menurut negara

adidaya tersebut. Pemerintah Thailand dianggap tidak agresif dalam mengadili dan menghukum pejabat yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia dan keterlibatan secara resmi menghambat upaya anti-perdagangan manusia. Hal tersebut mengakibatkan Thailand berada di *Tier 2 Watch List* untuk dua tahun berturut-turut. Perilisan laporan ini ditanggapi oleh Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Chan yang mengatakan bahwa tidak masalah dengan peringkat Thailand tersebut, namun pemerintahnya akan terus memerangi perdagangan manusia karena permasalahan tersebut adalah agenda nasional (<http://www.nationmultimedia.com/>, Thailand remains in Tier 2 Watch List in US human trafficking report, 2017).



Grafik 4. Tier 2 Watch List Thailand 2009-2016

Sumber : <https://journals.tdl.org> dalam dokumen “*Human Trafficking in Thailand*” oleh Chrystal Hoelscher diakses pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 23.34 WIB

Pada tahun 2015, sebuah media yaitu *World News* mengutip dari data *Human Trafficking* yang dirilis oleh *US Department of State* menunjukkan peringkat diberbagai negara terkait perdagangan manusia. Peta perdagangan manusia terburuk menunjukkan bahwa Thailand masuk dalam peringkat perdagangan manusia tertinggi di kawasan Asia-

pasifik. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi. Tak hanya Thailand beberapa negara di kawasan lain seperti Rusia, Yaman, Somalia, Aljazair, Maroko, Republik Afrika Tengah dan Venezuela juga merupakan negara dengan kasus perdagangan manusia terburuk (<https://www.theguardian.com/international>, 2015).

Perdagangan manusia di Thailand ini merupakan topik yang dibahas dibidang kontemporer. Bidang sosial, intervensi politik dan keadaan ekonomi telah membentuk kondisi yang memungkinkan untuk melakukan praktik tersebut terus berkembang. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius terhadap manusia dimana korban juga mengalami dipaksa, diserang, dieksploitasi, disiksa atau bahkan dibunuh oleh para pedagang atau pengeksploitasi. Perdagangan manusia di Thailand dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti perdagangan manusia untuk eksploitasi melalui pelacuran orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, untuk kerja paksa atau layanan dan perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, dan untuk eksploitasi dengan mengemis (Roujanavong, 2015, hal. 135). Sebagian besar korban perdagangan manusia yang diidentifikasi di Thailand adalah migran yang dipaksa, dipaksakan atau ditipu kedalam kerja paksa atau eksploitasi seksual komersial. Korban yang diperdagangkan di Thailand sebagian besar berasal dari Kamboja, Myanmar, Laos, Tiongkok Selatan dan Vietnam (SIREN, 2010, hal. 24).

C. Sisi Gelap Pariwisata Thailand: Perdagangan Manusia Dan Pariwisata Seks

Perkembangan pariwisata Thailand yang terus mengalami kemajuan pesat membuat destinasi pariwisata menjadi salah satu poin penting bagi Thailand. Dengan perkembangan dan perubahan tersebut tentu memberikan

dampak yang menimbulkan isu-isu baru. Baik dampak positif maupun dampak negatif muncul akibat dari perkembangan pariwisata Thailand yang menjadi pusat tujuan destinasi wisatawan asing di seluruh dunia. Dengan potensi lokasi Thailand yang strategis dan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju Asia, memberikan keuntungan bagi Thailand sebagai pasar ekonomi terbesar saat ini. Tak hanya menawarkan sektor perdagangan dengan Tiongkok, India dan negara ASEAN, namun kini sektor pariwisata sebagai destinasi dunia berpotensi juga menjadi bisnis yang besar (<http://www.asiacoldchainshow.com/>, 2016). Sektor pariwisata Thailand telah berpengaruh besar bagi negara tersebut seperti memperbaiki infrastruktur lokal, memberikan banyak kesempatan kerja, memperkuat mata uang mereka dan meningkatkan taraf hidup bagi banyak orang Thailand.

Perekonomian menjadi salah satu dampak dari berkembangnya industri pariwisata Thailand. Dengan terbukanya negara Thailand dengan pihak luar, mengakibatkan industri pariwisata Thailand bersifat liberal. Hal ini tak hanya berdampak positif bagi kemakmuran Thailand, industri pariwisata Thailand nyatanya memberikan sisi negatif pula. Beberapa hal negatif seperti tertumpunya perekonomian Thailand pada sektor destinasi pariwisata membuat pemerintah ekstra untuk memastikan bahwa masyarakat lokal yang hampir 90 persen bekerja di industri pariwisata untuk menyimpan uang mereka jika sewaktu-waktu pariwisata Thailand mengalami kemerosotan. Selain itu, Thailand sebagai negara tuan rumah pariwisata berdampak berubahnya karakteristik masyarakat lokal seperti mulai menjual obat-obatan terlarang ke wisatawan sebagai cara menghasilkan uang (UKessays, 2016). Pariwisata juga mengarah pada hal negatif yaitu perdagangan manusia.

Menurut *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dari Perserikatan Bangsa – Bangsa, Thailand adalah tujuan utama korban perdagangan manusia yang mayoritas adalah migran ekonomi dari negara-negara seperti

Myanmar, Laos, Kamboja dan Tiongkok (<https://borgenproject.org/>, 2014). Salah satu bentuk perdagangan manusia adalah sebagai pekerja seks komersial. Dampak pariwisata terhadap industri seks terhadap apa yang disebut pariwisata seks telah menjadi kontributor kontemporer utama bagi pertumbuhan pelacur anak di Thailand. Pada tahun 2002, ada sekitar 200.000 pekerja seks di Bangkok dan perdagangannya terus berkembang dimana 30% yang melakukan perdagangan adalah perempuan. Ada sekitar 20% dari semua korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Di wilayah Sub-Mekong mayoritas korban anak-anak dari berbagai negara bahkan benua atau disebut perdagangan intra-regional dan domestik (CNNI, 2014). Meskipun banyak yang melakukan pekerjaan tersebut karena keadaan, keterlibatan industri seks di pariwisata dianggap secara sukarela. Hal ini menyulitkan membedakan mana yang sebagai korban tindakan perdagangan manusia atau sebagai pekerja seks. Selain itu menurut *United Nations of High Commissioner of Refugees* (UNHCR) badan pengungsi Perserikatan Bangsa – Bangsa mengatakan bahwa pada 2013 ada tiga juta pekerja migran di Thailand yang sebagian besar jumlah tersebut disalurkan ke industri seks Thailand yang berkembang. Badan Perserikatan Bangsa - Bangsa lainnya seperti *Action for Cooperation Against Trafficking in Persons* mengatakan bahwa pariwisata seks terus menjadi faktor pemicu pasokan korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual dan pada waktu yang sama pula melakukan tindakan korupsi sehingga membatasi kemajuan upaya anti-perdagangan manusia (news.com.au, 2017). Dengan bertumpunya Thailand pada sektor industri pariwisata internasional sebagai sumber pendapatan yang besar membuat sedikitnya inisiatif untuk menerapkan undang-undang yang tegas terhadap perdagangan dan pekerjaan seks.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *UN Inter-Agency Project on Human Trafficking* pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 23% dari seluruh orang Kamboja yang dideportasi oleh pihak berwenang Thailand diperbatasan adalah korban perdagangan manusia. Kesuksesan

penyelundupan manusia dan diperdagangkan ini akibat adanya pejabat yang korupsi yang memfasilitasi penyelundupan migran tak berdokumen antara Kamboja dan Thailand yang kemudian menjadi korban perdagangan manusia (UNHCR, 2013).

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sebagian besar sektor pariwisata negara tersebut mendapatkan pendapatan nasional berasal dari pariwisata. Namun, pariwisata yang tersedia di Thailand juga memiliki sisi gelap yaitu wisata seks yang mencangkup sebagian besar wilayah Thailand industri pariwisata. Pelacuran di Thailand dianggap sebagai bagian *de facto* ekonomi. Walaupun sektor pariwisata merupakan pilar utama bagi Thailand dalam sektor penggerak ekonomi, namun kemunculan permasalahan perdagangan manusia melalui pelacuran yang tak hanya melibatkan perempuan namun juga anak-anak merupakan masalah sosial yang serius di Thailand (CNNI, 2014). Maka dari itu, banyak kalangan yang mulai mengangkat isu perlindungan anak dan membawa permasalahan tersebut sebagai permasalahan global yang perlu ditindak secara serius.

ZOE Foundation merupakan salah satu organisasi berasal dari Australia melihat fenomena perdagangan manusia di Thailand adalah hal yang serius. Mereka menyatakan bahwa suku dan etnis minoritas perempuan dan anak perempuan dari suku perbukitan utara sangat rentan karena kurangnya status hukum dan kewarganegaraan mereka. *ZOE Foundation* melihat bahwa pemerintah Thailand tidak memiliki undang-undang yang secara khusus menangani pariwisata seks (<http://www.zoefoundation.org.au/>, ND). Hal ini juga ditegaskan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) bahwa kurangnya status hukum adalah salah satu faktor dengan resiko terbesar untuk perdagangan manusia atau eksploitasi lainnya terhadap orang-orang minoritas.

Salah satu Direktur *For Freedom International* (FFI), Darren Herbold, menciptakan tim multi-disiplin (pemerintah dan LSM) yang memberikan dukungan terfokus kepada anak-anak yang dieksploitasi secara seksual. Ia melihat bahwa salah satu kota dengan tingkat perdagangan anak dengan jalur eksploitasi secara seksual terdapat di Phuket sehingga ia menciptakan yayasan tersebut di kota Phuket. Ia menambahkan bahwa yayasan tersebut memiliki hak istimewa untuk mendapatkan dukungan penegakan hukum Thailand. FFI juga bekerjasama dengan *Thailand Internet Crimes Against Children* (TICAC), FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Thailand dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual sehingga mereka dapat dilatih mengenai trauma yang dialami. Tak hanya itu Penasihat dari Polisi Kerajaan Thailand yang memimpin divisi TICAC, Pol Gen Tamasak Wicharaya, mengatakan bahwa mereka bekerjasama dengan Pusat Advokasi ANAK TICAC dan Act Phuket untuk menekan angka perdagangan manusia di Thailand (<http://thaiembdc.org/>, 2017).

Tak hanya terfokus di Phuket sebagai salah satu kota yang maju di Thailand, masalah perdagangan manusia khususnya terhadap anak-anak juga muncul di berbagai kota di Thailand. Maka dari itu, SOS Children's Villages salah satu organisasi yang terdapat di 4 kota besar di Thailand juga menyatakan bahwa meskipun Thailand berhasil mengurangi pekerja anak dalam dua dekade terakhir, namun eksploitasi anak-anak tetap menjadi masalah. Banyak anak ditemukan di industri seks komersial (<https://www.sos-childrensvillages.org/>, ND). Walaupun Bangkok dan Phuket adalah kota dengan daya tarik tinggi sebagai munculnya pariwisata seks dan perdagangan manusia, nyatanya tak hanya kedua kota tersebut.

Kawasan Sub-Mekong atau biasa disebut *The Greater Mekong Subregion* yaitu wilayah internasional lembah Sungai Mekong terdapat sekitar 200.000 hingga 250.000 perempuan

anak-anak yang diperdagangkan di Asia Tenggara setiap tahunnya. Di Thailand, wilayah tersebut meliputi Chiang Mai, dimana perdagangan manusia ini dijual ke Tiongkok Selatan, Kamboja dan Laos atau bahkan hingga negara kaya seperti Jepang, Timur Tengah dan Eropa. Fenomena ini menjadi perhatian masyarakat internasional, lembaga masyarakat dan juga ahli kesehatan karena mereka dijual untuk dijadikan pekerja komersial bahkan anak-anak. Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yaitu Development and Education Program for Daughters & Communities (DEPDC) menginformasikan bahwa dengan terus berkembangnya permasalahan perdagangan modern ini juga meningkatkan permasalahan tentang HIV/AIDS (<https://www.uab.edu/global/>, 2016).

Karen Stauss dari the Polaris Project juga mencatat bahwa undang-undang di Thailand terlalu lemah dalam hal eksploitasi anak di sektor pariwisata. Ia melihat undang-undang yang digunakan didalam negeri ini untuk mengadili pelanggaran seks dimana undang-undang tersebut menargetkan seluruh jaringan perdagangan manusia secara luas. Maka dari itu jaksa federal di Thailand tidak bisa bertindak tegas terhadap permasalahan ini. Hukum tersebut memang terlihat dapat menahan wisatawan seks, namun nyatanya wisatawan seks tetap menikmati kekebalan hukum(<http://pulitzercenter.org/>, 2009).

Lemahnya undang-undang di Thailand tersebut menjadikan banyak oknum yang masih dengan leluasa memanfaatkan pariwisata internasional Thailand sebagai tempat untuk perdagangan manusia. Tak hanya oknum dari kalangan biasa di dalam Thailand maupun dari luar Thailand yang melakukan tindakan kriminal tersebut, bahkan dari kalangan elit di Thailand turut dalam aksi perdagangan manusia. Seorang Jenderal Militer Angkatan Darat Thailand, Manas Kongpaen, adalah salah satu tokoh paling terkenal yang dinyatakan bersalah dalam persidangan perdagangan manusia yang melibatkan lebih dari 103 terdakwa yang dituduh terlibat

dalam perdagangan perbudakan modern tersebut. Ia dihukum karena pelanggaran melibatkan perdagangan manusia dan menerima suap yang dipenjarakan dengan hukuman 27 tahun penjara pada 19 Juli 2017. Ia memimpin sebuah operasi untuk mencegah migran dari pantai Thailand. Ia memperdagangkan migran tersebut dengan melibatkan 103 tersangka lainnya. Maka dari itu ia dinyatakan bersalah atas kejahatan terorganisir transnasional dengan bukti catatan jutaan baht telah ditransfer ke rekening banknya (<http://www.straitstimes.com/global>, 2017). Menurut Bangkok Post, Manas dikenai hukuman 13 tuduhan atas perdagangan manusia. 13 tuduhan tersebut meliputi perdagangan manusia termasuk anak-anak, penyelundupan orang asing ke negara tersebut, menahan mereka, menahan mereka untuk mendapatkan uang tebusan, melakukan kejahatan transnasional, menyerang korban dan menyembunyikan mayat mereka (<https://www.bangkokpost.com/>, 2015).